

## Elastisitas Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Iraq, Suriah Dan Isis

Ibnu Zulian

Universitas Potensi Utama

[ian\\_ib@ymail.com](mailto:ian_ib@ymail.com) / [ibnuzulian45@gmail.com](mailto:ibnuzulian45@gmail.com)

### ABSTRAK

*AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Pragmatisme politik juga mempermasalahkan bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara mekanisme pencapaiannya. Tidak mengejutkan apabila inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-kebijakan yang bersifat elastis. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, penulis membahas Elastisitas Politik Luar Negeri AS terhadap ISIS dengan kebaruan kajian tentang Inkonsistensi Kebijakan dengan menggunakan teori Pragmatisme dan melacak faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS melalui tipologi strategi politik luar negeri dari buku John. P. Lovell, yang model strategi ini dicetus oleh William D. Coplin. Inkonsistensi berkaitan dengan pragmatisme yang merupakan the way of life bangsa Amerika. Dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS, serta gaya kepemimpinan yang diterapkansangat berpengaruh sekali terhadap Elastisitas Politik Luar Negeri AS itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Amerika Serikat, Pragmatisme, Inkonsistensi, Elastisitas Politik Luar Negeri.

### ABSTRACT

*US often blamed by many parties running international policy double standards on the Middle East, Political pragmatism also questioned how the state can function. In terms of the consequences and actions always refer to individuals, groups, and society as a whole. US political goal-oriented on results that will be obtained without regard to how the mechanism. Not surprisingly, the inconsistencies and controversies in US foreign policy, but the interests pragmatically eventually forced the US to the policy that is elastic. The research type of research is descriptive explanative, the author discusses the elasticity of US foreign policy against ISIS with the novelty assessment of policy inconsistency by using the theory of pragmatism and track the factors that influence US foreign policy through the typology of foreign policy strategy of the book of John. P. Lovell, the model of this strategy is triggered by William D. Coplin. Inconsistencies with regards to pragmatism are the way of life of Americans. The dynamics of the invasion became a major influence on US policy process, as well as the leadership style that is applied very influential Elasticity US foreign policy itself.*

**Keywords:** United States, Pragmatism, Inconsistency, Elasticity of Foreign Policy.

## I. Pendahuluan

Amerika Serikat (AS) adalah negara unik yang di dalamnya terdiri berbagai bangsa bersatu padu menjadi sebuah negara adidaya, yakni selalu berusaha menjadi penguasa dunia untuk menegakkan nilai-nilai Amerika di seluruh muka bumi dengan dukungan ekonomi besar dan kekuatan militer raksasa. Dengan demikian, AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Konon, salah satu pegangan kunci AS ialah apa yang disebut sebagai *minus malum*, yaitu harus memilih yang kurang buruk ketika menghadapi yang terburuk.

Kini berkembang pula istilah baru yaitu Inkonsistensi kebijakan AS, ini merupakan deskripsi dan persepsi masyarakat dunia terhadap AS masa kini, yakni Kebijakan Luar Negeri yang tidak sesuai dengan kesepakatan/keputusan awal internal baik eksekutif maupun legislatif pemerintah AS, inkonsistensi sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan baik ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Inkonsistensi berkaitan juga dengan pragmatisme yang merupakan *the way of life* bangsa Amerika (Albertine, 2006: 89). AS juga mengakui bahwa politik luar negeri adidaya itu adalah pragmatisme dan AS selalu menjadi “pendamai”, pragmatisme mengajarkan betapa pentingnya pengalaman sebagai bagian dari perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

Sebagai negara liberal dan disaat ini eksekutifnya dikuasai Demokrat yakni presiden Barack Obama, maka dapat diasumsikan bahwa penguasa demokrasi liberal sangat menghindari akan peperangan dan demokrasi menjadi seutuhnya pemenang di AS. namun nyatanya saat ini terjadi inkonsistensi akan hal itu. Banyak kasus yang bersifat inkonsistensi seperti kebijakan persenjataan/militer AS terhadap India yang tidak sesuai kesepakatan atau isi perjanjian, begitu juga konflik peperangan antara Israel dan Palestina di mana AS sebagai penggaung utama Hak Asasi Manusia (HAM) belum mampu konsisten terhadap kebijakan yang dibuatnya. Memang begitu tebal dinding kepentingan nasional AS sehingga belum mampu mendobrak inkonsistensi AS yang seharusnya konsisten terhadap kebijakannya.

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Timur Tengah, khususnya Iraq dan Suriah merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam metode invasi yang begitu radikal atau ekstrem yang terus mencaplok dan membuat sensasi. AS sebagai polisi dunia tidak mungkin berdiam diri karena hal-hal yang berkaitan dengan Timur Tengah menjadi isu yang selalu diperhitungkan pemerintah AS.

Dinamika Strategi ISIS, termasuk juga pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, pemenggalan tentara dan wartawan, memicu kekhawatiran dan kemarahan dunia dan campur tangan militer AS. Namun memusnahkan ISIS tidak semudah menginvasi Iraq dan Afganistan sehingga membuat delima pemerintah AS, ketangguhan ekonomi ISIS dan kelengkapan alat perang menjadi salah satu alasan membuat AS sedikit kalangkabut. Tetapi pergerakan AS yang lambat dalam mengambil sikap menjadi pertanyaan besar masyarakat dunia, solusi-solusi menghindari perang hingga sikap tidak *all out* seperti yang AS sudah lakukan terhadap Irak menjadi kontradiktif sehingga kritik pemerintah AS untuk lebih proaktif selalu hadir baik internal maupun eksternal pemerintah (Yani, 2014: 10). Dalam fenomena ini penulis melihat adanya dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS yang tidak hanya di lembaga legislatif saja, namun secara eksekutif yaitu hak progratif presiden AS yaitu Barack Obama sangat besar pengaruhnya terhadap elastisitas politik luar negara AS itu sendiri.

Kehadiran Presiden Barack Obama telah memberi warna baru pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Barack Obamamenjanjikan corak kemitraan AS yang baru di Timur Tengah sebagai awaldiplomasi yang berakar dari “Saling Hormat dan Berbagi Kepentingan” dan dalam corak kemitraan ini begitu mudah terjadi berbagai polemik yang bersifat inkonsistensi. Oleh karena itu, penulis menggali lebih dalam baik secara sistemik maupun analitik (non sistemik) dengan bagaimana proses pemerintah AS dengan konsistensi kebijakan institusinya yang menyatakan perang terhadap ekstremisme atau terorisme serta menegakkan HAM yang kuat yang telah disepakati sepenuhnya yang kemudian terjadi inkonsistensi begitu saja. Dan sudah barang tentu hal ini berpengaruh terhadap AS secara persepsi dalam hubungan internasional.

## **II. Kerangka Teori**

Dalam memahami studi kebijakan politik luar negeri, kita harus berangkat dari sebuah lima unsur dasar ilmu politik. Dalam lima unsur tersebut adalah (1) Negara, (2) Kekuasaan, (3) Pengambilan keputusan, (4) Kebijakan, (5) Atribut dan distribusi. Negara merupakan aktor yang bertanggung jawab dalam Kebijakan Luar Negeri, sedangkan kekuasaan (*power*) adalah reformulasi dari kemampuan Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses kebijakan politik luar negeri sebuah Negara berakar dari sebuah keputusan artinya ketika dalam posisi ini pembentukan kebijakan luar negeri masih bersifat politis atau intra-Negara.

Selanjutnya dari hasil alternatif yang terbaik maka itulah yang di sebut sebagai kebijakan/kebijaksanaan atau alternatif yang sudah di pilih oleh pemerintah yang sudah secara legal dan siap untuk di implementasikan. Dalam implementasi tersebut jika bersifat dalam negeri inilah yang disebut sebagai kebijakan domestik (*domestic policy*). Tetapi jika sudah melintasi batas tradisional kedaulatan Negara berupa wilayah maka fenomena ini sudah bersifat ke-HI-an dan menjadi studi hubungan internasional (Fathun. 2015: 15). Sehingga Banyu Parawita dan Muhamad Yani menjelaskan pula kebijakan politik luar negeri sebuah Negara adalah *action theory*(Banyu Parawita dan Muhamad Yani. 2005: 47), kemudian T. May Rudi melanjutkan bahwa sisi variable dari kebijakan politik luar negeri bertumpu pada keputusan-keputusan (*decision*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*), yang di asumsikan untuk pemilihan tujuan tertentu, pemilihan sarana dan cara implementasi(Rudy. 2003: 89). Kemudian disimpulkan oleh Holsti bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah Negara terdiri ada empat komponen yakni : (1) orientasi kebijakan politik luar negeri, peran nasional, (3) tujuan dan (4) tindakan (Holsti K J. 1988: Bab 4).

Secara umum Kebijakan Luar Negeri Amerika di Timur Tengah bergerak di dua posisi eksklusif yang tidak sama. Pertama yaitu pendekatan global: AS beranggapan secara keseluruhan kestabilan hubungan antara negara yang akan menghasilkan keseimbangan pada setiap negara Timur Tengah. AS berusaha membuat kebijakan negara pusat atau negara pengontrol (*state-centric*), dengan ikut campur tangan dalam masalah negeri negara Timur Tengah. Kedua yaitu AS mulai agresif mempromosikan demokrasi dengan politikus Islam di negara Timur Tengah, ini merupakan respons dari kebijakan AS dengan kebudayaan Arab yang anti- modern dan anti Barat (Yakub, 2009).

Menelaah kembali politik luar negeri AS di kawasan Timur Tengah, maka tindakan AS yang perlu difokuskan bahwasanya AS membela kepentingan nasional yang mana dan bagaimana. Ada 2 pendekatan penting dalam menganalisa politik luar negeri AS di Timur Tengah yaitu Sistemik dan Analitik atau Sub-Sistemik, pendekatan sistemik mengawali analisa dari sistem dan menyimpulkan perubahan-perubahan sistem yang bersangkutan pada konteks yang (sering) dianggap sebagai faktor eksternal dari suatu negara yang politik luar negerinya sedang dianalisa. Tentu saja, faktor internal bukan berarti tanpa adanya sentuhan sama sekali. Kemudian untuk pendekatan analitik pada umumnya mengawal analisa dari konsep-konsep yang lebih bersifat internal seperti Teori-teori *Decision Making Process*, Teori *Power Elite*. Politik luar negeri AS sudah tentu banyak bentuk dan variasinya sehingga bisa saja menggunakan analisa perbandingan konstelasi eksekutif AS dengan berbagai asumsi-asumsi serta persepsi (Warsito, 1998: 68-69).

## **Pragmatisme**

Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani "pragma" yang berarti perbuatan atau tindakan. "Isme" di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme berarti: ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kreteria kebenarannya adalah "faedah" atau "manfaat". Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar apabila teori dapat diaplikasikan (*if it works*) (Abdullah, 2004: 02).

## **Pragmatisme Amerika Serikat**

Dalam buku Albertine Minderop yang berjudul "Pragmatisme: Sikap Hidup dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat" mengamati dan menganalisis perkembangan politik luar negeri AS bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Amerika Serikat memiliki pandangan politik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut menurut Albertine Minderop lebih disebabkan oleh pragmatisme politik yang memadukan antara nilai-nilai idealisme dan realisme politik. (Albertine, 2006: 113). Dalam pendekatannya terhadap hubungan politik, baik domestik maupun internasional, pendekatan pragmatis menggunakan dasar yang berbeda, yakni menggunakan dasar politik tradisional melalui pendekatan pada filsafat politik, hukum dan institusi, dan dasar politik *behavioral* dengan penekanan pada proses politik, perhitungan, dan prediksi (Albertine, 2006: 114). Dengan demikian dalam pragmatisme politik bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya.

Pragmatisme mengandalkan peran pengalaman manusia, pada realis dan kemajemukan (Albertine, 2006: 114). Oleh karena itu pragmatisme bersifat terbuka, fleksibel, dan pluralistik. Kebenaran terletak pada konsekuensi praktis dari suatu tindakan, kemanfaatan dan kesejahteraan demi kepuasan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut tidak mengejutkan apabila seringkali kita menemukan inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. dalam tulisan Albertine berkesimpulan meskipun idealisme dan identitas dipertimbangkan dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang bersifat elastis yakni kontradiktif dan penuh ironi.

## Model Kebijakan LuarNegeri

### Model Wiliam D. Coplin

Model ini dicetuskan oleh Wiliam D. Coplin (1971), dalam model ini bisa di mainkan dalam keadaan damai maupun perang dalam hubungan internasional. **Strategi Leadership** menyangkut cara pemimpin dalam menggunakan cara-cara tawa menawar dalam merebut kepentingannya. Biasa menggunakan cara-cara persuasif walaupun terkadang bisa menggunakan kekerasan pula. Cara ini menitik beratkan pada kemampuan kepemimpinan seorang kepala Negara dalam merumuskan kepentingan Negara. Dalam model ini posisi Negara sangat superior atau lebih kuat dengan Negara lain. **Strategi Concordance** menitik beratkan pada adanya keselarasan di antara aktor-aktor yang berhubungan saling menguntungkan dan saling selaras dan menghindari salah paham dalam politik internasional. **Strategi konfrontasi** menitik beratkan pada bagaimana salah satu aktor mempertajam isu-isu konflik masa lalu karena menyadari sehingga menjadikan konflik dalam politik internasional. Untuk itu salah satu aktor harus menerapkan **Strategi akomodasi** untuk menengahi salah paham antar aktor (Masoed, 1990: 191).

### III. Pembahasan

Strategi erat kaitannya dengan menang dalam perang, taktik, serta memaksa pihak lain untuk mengikuti kehendak kita. Akan tetapi, memasuki era modern seperti ini terjadi pergeseran makna lebih luas bukan hanya seputar perang melainkan bagaimana suatu negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Strategi adalah langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.(Masoed, 1989:09). Suatu strategi haruslah dipikirkan secara matang baik dari sisi keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan. Pembuat keputusan harus paham benar akan situasi yang sedang terjadi dan tujuan yang ingin dicapai.

### Gambar 1. Penilaian Tentang Strategi Lawan

		Penilaian tentang Strategi Lawan		
			Mengancam	Mendukung
Perkiraan Kemampuan Sendiri	Lebih Kuat	Lebih Kuat	Konfrontasi	Kepmimpinan
	Lebih Lemah	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordan

**Sumber:** John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinehart Winston 1970). Hal. 99. 1.

Dengan demikian penulis menggunakan tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell. Tujuan tipologi adalah membuat gambaran yang teratur untuk mengklasifikasikan serta mendeskripsikan suatu fenomena. Ketika dihadapkan dengan suatu obyek penelitian, tipologi akan membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang penting dari obyek tersebut. Tipologi ini mendorong untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Terdapat empat dimensi yang menjadi komponen utama dalam tipologi strategi politik luar negeri John. P. Lovell yaitu konfrontasi, akomodasi, kepemimpinan (leadership), dan konkordan.

### **1. Strategi Kepemimpinan**

Apabila menganalisa Kebijakan Luar Negeri suatu negara, maka harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat Kebijakan Luar Negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat Kebijakan Luar Negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil Kebijakan Luar Negeri (William, 1971: 182). William D. Coplin menjelaskan tentang tiga Konsiderasi sebagaimana yang disebutkan di atas yaitu: Pertama, kondisi politik dalam negeri suatu negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer suatu negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Ada empat faktor dominan dalam Kebijakan Luar Negeri, antara lain tindakan dalam pengambilan keputusan, politik domestik, faktor ekonomi-militer, dan situasi internasional. Faktor pertama merujuk pada pemerintahan Barack Obama sebagai aktor-aktor yang memformulasikan Kebijakan Luar Negeri. Faktor kedua menjadi faktor yang mempertimbangkan kepentingan nasional Amerika Serikat yang ikut menentukan Kebijakan Luar Negerinya. Faktor ketiga adanya pertimbangan atas kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Serta faktor keempat yang merujuk pada perubahan situasi internasional (William, 1971: 159-185). Namun faktor yang lebih difokuskan adalah faktor pertama yang merujuk pada pemerintahan Barack Obama sebagai aktor-aktor yang memformulasikan Kebijakan Luar Negeri.

Dalam model strategi kepemimpinan ini posisi Negara sangat superior atau lebih kuat dengan Negara lain. Ini tercermin dalam Sikap hati-hati Presiden Barack Obama bisa dimengerti. Presiden Barack Obama dipilih untuk menghentikan keterlibatan Washington dalam perang di luar negeri. Biar bagaimanapun, serbuan Amerika ke Iraq dan kekacauan berdarah setelah kejadian itu (Pujayanti, 2014: 6-7), diyakini banyak pakar sebagai penyebab utama runtuhnya struktur kenegaraan Irak. Konflik sektarian dan etnis yang muncul kemudian, menyebar hingga ke perang saudara di Suriah. Menurut William D. Copley Strategi Leadership adalah menyangkut cara pemimpin dalam menggunakan cara-cara taw-menawar dalam merebut kepentingannya. Biasa menggunakan cara-cara persuasive walaupun terkadang bisa menggunakan kekerasan pula. Cara ini menitik beratkan pada kemampuan kepemimpinan seorang kepala Negara dalam merumuskan kepentingan Negara (William, 1971: 102).

Serangan udara telah memperlambat laju ofensif *Islamic State* tetapi tidak menghentikan mereka, baik di Suriah maupun Irak. Namun laporan terbaru menyebutkan, milisi ISIS kini sudah masuk hingga ke kawasan seputar ibukota Irak, Bagdad. Disebut-sebut, bandara Bagdad kini berada dalam jarak tembak artileri milisi. (*Perang Isis Vs Amerika Strategi Perang Obama terhadap Daulah Islam Gagal*, 2016: Par. 2-3). Di Washington kritik terhadap strategi serangan udara Presiden Barack Obama juga makin meningkat. Kini dipertimbangkan pengiriman pasukan khusus menarget pimpinan milisi. Tapi itu tidak akan menenangkan kelompok ultra konservatif Partai Republik, yang mendesak pengiriman segera pasukan darat. Tapi untuk sementara itu, publik Amerika masih mendukung pendekatan hati-hati dari Presiden Barack Obama. Ada beberapa alasan politis yang berkaitan dengan dukungan Amerika Serikat atas pihak oposisi guna meruntuhkan pemerintahan Bassar al-Assad, yaitu pertama, runtuhnya kepemimpinan Bassar al-Assad akan memperkokoh posisi Israel dan kesejahteraannya telah menjadi dasar kebijakan Amerika Serikat (Nining, 2015: 42-44). Jatuhnya bassar al-Assad akan mengubah konstelasi kekuatan politik di Suriah. Posisi Amerika Serikat bisa menjadi kuat dibandingkan sebelumnya mengingat pemerintahan pasca era Bassar al-Assad diharapkan oleh Amerika Serikat tunduk kepada kepentingannya. Lengsernya Bassar al-Assad dianggap sebagai peluang bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan baik dengan Suriah karena selama ini rezim Bassar al-Assad adalah figur yang secara terang-terangan memiliki keberanian setelah Iran untuk menentang hegemoni Amerika Serikat.

## **2. Strategi Konkordan**

Strategi ini bermaksud menitik beratkan pada adanya keselarasan di antara aktor-aktor yang berhubungan saling menguntungkan dan saling selaras dan menghindari salah paham dalam politik internasional. Dalam istilah konkordan ini kedua negara memilih untuk mencari jalan *win win solution* dimana posisi keduanya saling menguntungkan. Bagi negara yang lebih lemah, untuk menghindari konflik dengan negara yang lebih kuat negara tersebut lebih memilih membuat kebijakan yang tidak berpeluang menimbulkan konflik dengan negara lebih kuat dan cenderung mendukung inisiatif-inisiatif dari negara tersebut.

Seperti diketahui keadaan di Suriah sangat rumit, masing-masing pihak oposisi tidak terkoordinasi dengan baik, masing-masing mempunyai pemimpin dan tujuan berbeda. Para pengunjuk rasa dan tentara pemberontak tidak saling bersinergi dan tidak terkoordinasi, masing-masing pihak berbeda malah saling bertikai. Iran malah menuduh bahwa yang membunuh pengunjuk rasa dengan senjata kimia tersebut adalah tentara pembelot yang dibiayai oleh asing. Dikhawatirkan pasca serangan AS, apakah berhasil atau tidak, yang pasti Suriah akan seperti negeri rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, dan rakyat Suriah akan semakin menderita.

Mencermati langkah Al-Baghdadi serta pengikutnya, dan bagaimana AS menyikapi kelompok ini. Presiden Barack Obama mulai melangkah mundur setelah selama sepekan lalu mengancam akan segera mengagresi Suriah atas tuduhan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Damaskus. Sebelumnya, Presiden Barack Obama menyebut serangan senjata kimia sebagai sebuah ancaman bagi AS dan sekutunya, oleh sebab itu serangan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindak (Jery, 2013). Sebagian pengamat memandang perubahan sikap presiden AS itu berhubungan dengan transformasi terbaru di tingkat regional dan internasional.

Presiden Barack Obama tidak dapat menarik kesepakatan internasional melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Suriah. Padahal selama ini tiga resolusi untuk meningkatkan tekanan terhadap Suriah telah diusulkan oleh Barat dan sekutunya kepada Dewan Keamanan, namun ketiga resolusi itu telah diveto oleh anggota tetap lainnya seperti Rusia dan Cina. Baru-baru ini Inggris juga mengusulkan sebuah draf resolusi untuk memperoleh persetujuan serangan militer ke Suriah dari Dewan Keamanan, namun lagi-lagi upaya tersebut gagal (*Perubahan Sikap Presiden AS terkait Serangan ke Suriah*, 2013: Par. 03). Rusia menekankan adanya solusi politis dari negosiasi ini sehingga dapat menghindarkan Suriah dari serangan militer yang akan dilakukan oleh AS. AS telah melihat adanya sisi kooperatif yang ditunjukkan oleh Suriah yaitu menyerahkan data-data

senjata kimia yang dimiliki. Kerry juga menekankan bahwa resolusi damai lebih baik dibanding dengan militer (Pratiwi, 2016: 2296). Hal ini menunjukkan bahwa AS juga memiliki keinginan untuk menempuh solusi damai dan kedua belah pihak akan berusaha agar bisa menyelesaikannya.

### **3. Strategi Konfrontasi**

Strategi ini menitik beratkan pada bagaimana salah satu aktor mempertajam isu-isu konflik masa lalu karena menyadari sehingga menjadikan konflik dalam politik internasional. Konfrontasi ialah sikap terang-terangan, permusuhan, pertentangan, berhadapan secara langsung. Apabila suatu negara merasa lebih kuat dibandingkan dengan negara lain dan posisi negara tersebut terancam, negara tersebut cenderung akan mengambil jalan konfrontasi dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki seperti ekonomi dan militer. Bentuk konfrontasi tersebut antara lain bisa berupa embargo, boikot, maupun serangan militer

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus ikut campur dan punya peran di Timur Tengah. Presiden AS ini juga menyatakan bahwa selama puluhan tahun, Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti kontra terorisme, menghentikan penyebaran senjata nuklir, mengamankan perdagangan bebas, menjaga keamanan, dan membela keamanan Israel serta berusaha mendamaikan konflik Arab-Israel.

Dengan ikut campurnya Amerika Serikat dalam menangani ISIS di Irak dan Suriah, membuktikan bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan sendiri terhadap Irak dan Suriah. Alasan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat mencakup dua kepentingan (Adeodatus, 2014: 8), yaitu:

*a. Middle Range Objectives*

Berupa kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian melalui eksplorasi sumber alam terutama minyak dan gas.

*b. Long Range Goals*

Merupakan suatu pendekatan teori yang mengarah pada rencana jangka panjang dan sebagai penentu sebagai strategi, yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi tersebut berguna untuk mengarahkan suatu organisasi mencapai suatu tujuan.

Pada Kamis, 13 Juni 2013, Amerika Serikat membuktikannya, Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden Assad menggunakan

senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi (*UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm chemical weapon use*, 2013: Par. 3-4). Pasukan militer Amerika Serikat dan negara mitranya terus melancarkan serangan udara terhadap pasukan ISIS di Suriah dan Irak selama dua hari belakangan, kata Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat pengebom dan pesawat tempur melancarkan tujuh serangan udara di Suriah dan Empat Belas serangan udara di Irak menurut departemen tersebut. Serangan udara di wilayah Al Hasakah di Suriah menghancurkan empat unit taktis, tujuh kendaraan, dua kendaraan lapis baja, satu peti kemas, dan tiga posisi ISIS.

Juru bicara Laksamana John Kirby mengatakan para pemberontak bersenjata hanya dapat dikalahkan oleh pasukan lokal. Termasuk pemberontak moderat di Suriah dan pasukan pemerintah Irak serta pasukan Kurdi. Ia menambahkan, perlu waktu untuk melatih dan mempersenjatai pasukan yang dapat bertempur dan bekerja sama dengan penasihat militer AS. "Kami tidak memiliki pasukan di dalam Suriah yang dapat bekerja sama," kata Kirby (*Koalisi Serangan Udara AS Kian Meningkatkan terhadap ISIS*: 2015) Sementara itu, di Gedung Putih, pejabat mengakui kekuatan udara saja tidak akan cukup.

AS yang memimpin koalisi 62 negara dalam melawan ISIS sudah melancarkan serangan udara sejak September 2014. Serangan yang tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan Pemerintah Suriah itu diragukan keberhasilannya. Gedung Putih mengklaim bahwa strategi AS untuk memerangi ISIS di Irak dan Suriah berhasil. Tapi, Presiden Barack Obama sendiri mengakui untuk mengalahkan ISIS butuh waktu yang tidak sebentar.

Negara-negara koalisi yang melancarkan serangan udara di Irak meliputi Amerika Serikat, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Belanda dan Inggris. Negara-negara koalisi yang melancarkan serangan udara di Suriah meliputi Amerika Serikat, Bahrain, Jordania, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan terakhir mengatakan sekitar 200 ribu orang telah mengungsi dari Kobane dan dari desa sekitarnya sejak pertempuran terjadi. (*Koalisi Serangan Udara AS Kian Meningkatkan terhadap ISIS*, 2015: Par. 2). Pada Rabu, Presiden AS Barack Obama mengatakan AS akan tetap meningkatkan perlawanan terhadap ISIS.

#### **4. Strategi Akomodasi**

*Mediation* atau mediasi adalah salah satu bentuk akomodasi yang menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam Kamus Hubungan Internasional, mediasi ialah bentuk prosedur penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga dalam menemukan jalan keluar dengan memberikan saran-saran penting. Mediasi dapat diminta oleh pihak yang terlibat atau dilakukan secara

sukarela oleh pihak ketiga. Dalam praktek internasional negara yang bersengketa tidak mencantumkan bahwa mediasi sebagai tindakan yang bersahabat, namun tidak juga mereka memiliki keraguan untuk menerima penawaran mediasi yang diminta (C.Plano & Olton. 1999: 206). Akomodasi berarti kompromi yang dilakukan oleh negara lemah ketika negara yang dihadapinya merupakan kekuatan yang mengancam. Negara yang lemah berupaya untuk menghindari terjadinya konflik dengan negara yang lebih kuat meskipun ada kemungkinan negara lemah tersebut dapat menggunakan strategi konfrontasi ketika kekuatan negara yang kuat meningkat. Kompromi tersebut bisa berbentuk diplomasi, *lobbying*, nota protes, dan lain-lain.

Presiden AS Barack Obama, mengakui pemerintahannya meremehkan ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah (*Obama Akui AS Remehkan Ancaman ISIS*, 2015: Par. 1-2).Obama menambahkan Washington juga terlalu menaruh kepercayaan terhadap keefektifan pasukan keamanan Irak, yang sudah dilatih dan dipersenjatai AS namun dengan mudah dikalahkan pasukan ISIS saat menyapu wilayah utara negeri itu. Saat diwawancarai stasiun televisi CBS, Presiden Obama mengakui pemerintahannya tak menyangka konflik bersenjata Suriah yang sudah berlangsung hampir empat tahun ini justru menjadi tempat kelompok-kelompok militan memperkuat diri dan kembali menebar bahaya. Presiden Obama menambahkan para pejuang Al Qaeda yang diusir dari Irak oleh pasukan AS sebelum ditarik mundur pada 2011 dengan bantuan suku-suku Sunni Irak ternyata mampu membenahi diri di Suriah dan menciptakan ISIS yang lebih berbahaya.

Untuk penyelesaian masalah yang lebih permanen maka harus ada perubahan tak hanya di Irak namun juga di negara-negara lain seperti Suriah dan negara-negara lain di kawasan harus memahami apa arti akomodasi politik. Saya kira kepala badan-badan intelijen, Jim Clapper telah mengakui bahwa mereka sudah meremehkan situasi di Suriah, mengacu kepada direktur intelijen nasional AS (*Ibid*, 2015). Washington juga terlalu mempercayai kemampuan pasukan Irak yang telah dilatih AS dalam memerangi kelompok militan, Presiden Barack Obama membenarkan situasi tersebut. Lebih jauh, Barack Obama mengatakan kemampuan Suriah dan Irak menyelesaikan krisis politik dalam negerinya akan memberikan dampak positif untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar.

Kemudian rakyat Suriah telah kehilangan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri sebagai akibat dari meluasnya konflik ke tingkat internasional. Namun untuk menyelesaikan krisis Suriah tanpa konsensus internasional, tidaklah mungkin. Tak satu pun pihak di Suriah sekarang memiliki pilihan selain menerima internasionalisasi ini. Terlepas

dari fakta bahwa solusi akan disesuaikan dengan standar internasional, bukan Suriah. “Jenewa-2” akan memberi kesempatan pada masyarakat internasional untuk berkonsentrasi pada penyelesaian krisis Suriah. Bukan hanya mendukung salah satu pihak yang bertikai. Tugas “Jenewa-2” adalah memindahkan krisis Suriah dari aliran militer ke aliran politik. Hal ini dapat membuka pintu bagi masyarakat sipil, agar mereka menyatakan keberadaan diri mereka dan menjadi elemen utama dalam proses pemulihan Suriah (*Peran Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah*, 2015: Par. 3). Dari sudut pandang Rusia hasil Jenewa II (apapun itu) akan menjadi sebuah kesuksesan. Bagaimanapun juga, harapan utama mayoritas negara di dunia adalah segera runtuhnya rezim Assad. Karena itu, lawan-lawan Damaskus harus berbicara dengan Assad, meski dengan berat hati. Sulit untuk mengatakan posisi siapa yang lebih kuat (*Jenewa II: Perjudian Penuh Intrik di Tengah Krisis Suriah*: 2014: Par 4.) Masyarakat internasional juga tidak ingin supaya seseorang mengambil keputusan atas namanya atau menjadi polisi dunia. Sejarah, terutama perang-perang yang diikuti oleh Amerika, menunjukkan bagaimana masyarakat terbelah setelah intervensi militer dan konflik berkepanjangan dan destruktif yang diakibatkan olehnya.

Salah satu pihak ketiga ialah Rusia yang selalu mendukung rezim yang, meskipun bermasalah, masih tetap lebih kohesif daripada pihak oposisi. Amerika Serikat mendukung oposisi yang tidak mempunyai kesatuan dan ini menjadi masalah bagi Washington. Pemerintahan Presiden Barack Obama telah mencoba untuk mengubah situasi dengan cara pemberian bantuan militer kepada oposisi, kemudian dengan bantuan ancaman intervensi. Tetapi pada akhirnya mereka terpaksa untuk menerima inisiatif Rusia. Secara umum, posisi Amerika ditandai oleh ketiadaan strategi politik yang jelas dan ketidakmampuan untuk memahami semua seluk-beluk realitas Suriah.

Apa yang mengkhawatirkan kita, sebagai rakyat Suriah, adalah tahap berikutnya dari kerjasama AS dan Rusia: berhasilkah Rusia memaksa rezim Suriah untuk membuat konsesi yang nyata demi penyelesaian secara politik. Sampai saat ini, mereka hanya membatasi pada penghancuran senjata kimia. Namun, senjata itu menjadi bagian dari konflik Suriah baru-baru ini saja. Dan fakta bahwa rezim berkolaborasi dalam penghancuran senjata kimia, tidak pernah akan cukup supaya kami percaya bahwa ini adalah bukti kesediaannya untuk mengambil jalan penyelesaian secara politik. Konsensus Rusia dan Amerika memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berhenti memberi dukungan kepada salah satu pihak dalam konflik dan mulai mendukung penyelesaian konflik itu sendiri. Selain itu juga untuk mendukung koalisi yang akan

muncul setelah konferensi “Jenewa-2”. Ini akan membuat peran Rusia dapat diterima oleh sebagian besar pihak Suriah, bukan hanya oleh rezim (*Ibid*, 2013: Par. 09).

Rusia dapat bergantung pada masyarakat sipil Suriah. Kehadiran perwakilan masyarakat sipil pada konferensi “Jenewa-2” diperlukan untuk keberhasilan konferensi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, masyarakat sipil Suriahlah yang paling mampu mengekspresikan aspirasi rakyat Suriah dan menyampaikan pandangan rakyat Suriah tanpa polarisasi pendapat. Partisipasi perwakilan masyarakat sipil dalam negosiasi dan dalam masa transisi diperlukan untuk keberhasilan proses ini.

## **V. Kesimpulan**

Kondisi yang lambat dan sabar ini (tarik ulur) merupakan sebuah perhitungan yang tidak jarang AS dipandang inkonsisten oleh dunia atau politik standar ganda menjadi cerita klasik masa lalu dan kini. bahwasanya dibalik inkonsistensi AS terhadap negara lain adalah adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai AS seperti kepentingan ekonomi dan strategis, kemudian dibalik inkonsistensi AS sangat membahayakan keamanan internasional dengan ada inkonsistensi tersebut justru memperkeruh hubungan AS dengan negara lain. Amerika Serikat sedari awal sudah berkomitmen untuk memberi kestabilan pada Timur Tengah, namun sejauh ini itu belum terwujud secara nyata.

Pragmatisme politik bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Bisa dikatakan politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara atau mekanisme pencapaiannya. Tidak mengejutkan apabila kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang bersifat elastis yakni kontradiktif dan penuh ironi.

Tindakan ISIS sangat bertolak belakang dengan ide-ide perlindungan Hak Asasi Manusia. Atas dasar itu banyak negara yang bergabung demi menghentikan ISIS dan mengurangi masalah yang timbul di Kawasan Timur Tengah. Selain negara-negara yang bergabung bersama Amerika tersebut adapula yang bergerak sendiri. Yang menarik dalam persoalan ini adalah bagaimana praktek-praktek yang dilakukan oleh negara tetangga sesama Kawasan Timur Tengah terhadap negara yang menjadi korban ISIS, yaitu Irak dan Suriah. Kemudian dipersimpangan jalan ada gejala ketidakpercayaan atau sedikit perlawanan dari pemerintah Suriah yaitu manfaat determinasi Putin sebagai kepala pemerintahan Rusia, Solusi krisis Suriah kini tidak bisa lepas dari peranan Rusia.

Penulis menemukan dalam beberapa analisis strategi AS mengalami dilema tertentu dalam pembuatan keputusan kebijakannya, terbukti langkah yang dilancarkan Barat dan aliansinya terbukti gagal tumbangkan Assad dan justru perbesar kekuasaan ISIS. Jika diperhatikan saksama, terdapat praktek yang kompleks dari negara-negara tersebut dalam menyikapi praktek ISIS. Pada Negara tertentu ada yang pergerakannya sulit dipahami karena pertimbangan keadaan, adapula yang tidak mau ikut campur terlalu dalam, dan adapula yang bergerak setengah hati, seperti Arab Saudi, Qatar, Iran, dan Turki adalah empat negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam stabilitas Kawasan Timur Tengah.

Rusia sebagai mediator penting yang selalu mendukung rezim, meskipun bermasalah, masih tetap lebih kohesif daripada pihak oposisi. Amerika Serikat mendukung oposisi yang tidak mempunyai kesatuan dan ini menjadi masalah bagi Washington. Pemerintahan AS telah mencoba untuk mengubah situasi dengan cara pemberian bantuan militer kepada oposisi, kemudian dengan bantuan ancaman intervensi. Tetapi pada akhirnya mereka terpaksa untuk menerima inisiatif Rusia. Secara umum, posisi Amerika ditandai oleh ketiadaan strategi politik yang jelas dilema dan ketidakmampuan untuk memahami semua seluk beluk realitas Suriah. Secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah Konsensus Rusia dan Amerika seharusnya memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berhenti memberi dukungan kepada salah satu pihak dalam konflik dan mulai mendukung penyelesaian konflik itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- C.Plano, Jack, Olton, Roy. 1999.*Kamus Hubungan Internasional Edisi Ketiga*, Putra A Bardin. CV.
- D. Coplin, William. 1971. *Introduction to International Politics : A Theoretical Overview*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Mas'oed, Mochtar. 1989. *Ilmu Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*". Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Masoed, Mochtar,. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional-Disilin dan Metodologi*. Jakarta: LPP3Es.
- Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme-Sikap Amerika dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*; Ed .1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Najib Abdullah, Mohammad. 2004. *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
- Rudy, T. May. 2003. *Studi Strategis, Transformasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: Rafika Aditama.
- Yani, Septi. 2014. *Sikap Amerika Serikat Terhadap Gerakan Islamic State Iraq and Syria*. Jakarta: Univeristas Prof. DR. Mostopo.

- Yakub Hal.abi. 2009. *US Foreign Policy in the Middle East; from Crsisis to Change*. England: Asghate.
- Warsito, Tulus. 1998. *Terori-Teori Politik Luar Negeri: Relavansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

### **Jurnal**

- Cordesman, Anthony H.. 2014. *The New "Great Game" in the Middle East: Looking Beyond the "Islamic State"*.pdf.
- Fathun. 2015. *Materi Kuliah ke I Pengambilan keputusan dalam Hubungan Internasional.1*. Makassar: UNIFA.
- Holsti K J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Bab 4.
- Inas Pratiwi,Fadhila.*Pengaruh Rusia terhadap Pembatalan Serangan Militer Amerika Serikat ke Suriah pada Tahun 2013, Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. . 2016.*
- Nining Anggriani. 2015. *Sikap Amerika Serikat Terhadap Geraakan ISIS Di Irak & Suriah*. Makassar: FsiPOL UNHAS.
- Parawita, Banyu dan Yani, Muhamad. 2005. *Action Theory Lumba, Adeodatus.intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik politik di Suriah tahun 2011*. 2014.
- Pujayanti, Adirini. *Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (Niis)*.2014. Vol. VI, No. 18/II/P3DI/September/2014.

### **Internet**

- Jenewa II: Perjudian Penuh Intrik di Tengah Krisis Suriah*. Diakses pada 08 November 2016. Pada Jam 08.42 WIB. (<http://indonesia.rbth.com/politics/2014/02/19/jenewa-ii-perjudian-penuh-intrik-di-tengah-krisis-suriah-23237>.)
- Jery. 2013. *Perubahan Sikap Ppresiden AS terkait Serangan ke Suriah*. Diakses pada 9 November 2015 | 12.12 WIB. (<http://www.sinarpaginews.com/templates/sinarpaginews/favicon.ico>).
- IRIB Indonesia/PH. 2014. *Kelemahan AS Perangi ISIS*. Diakses 27 November 2015. Pada jam 14.00 WIB. ([http://indonesian.irib.ir/component/jcomments/feed/com\\_k2/86478](http://indonesian.irib.ir/component/jcomments/feed/com_k2/86478)).
- Peran Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah. Diakses 12 Oktober 2015 | 12.00 WIB. (<http://indonesia.rbth.com/politics/2013/10/16/peran-rusia-dan-amerika-serikat-dalam-konflik-suriah-22625>).
- <https://www.idjoel.com/perang-isis-vs-amerika-strategi-perang-obama-terhadap-daulah-islam-gagal/>
- UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm Chemical weapon use', *Fox News (online)*.Diakses pada 26 September 2016. (<http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/>)